

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PAKISTAN MENOLAK MEMBANTU SERANGAN UDARA ARAB SAUDI DI YAMAN

Bab IV ditulis untuk menjelaskan lebih lanjut hipotesis yang terdapat pada bab I. Dengan demikian bab ini berisi tiga judul.

Judul pertama adalah kompleksitas konflik Iran dan Saudi. Judul ini akan menjabarkan hubungan Saudi-Iran sebelum revolusi 1979, hubungan mereka setelah revolusi Sampai perang Irak, dan selisih pendapat mereka dalam konflik Yaman.

Judul kedua adalah kompleksitas konflik Sunni-Syiah di Pakistan. Judul ini akan menjabarkan konflik ideologi Sunni-Syiah, eskalasi konflik, dan implikasi konflik mereka di domestik Pakistan.

Judul ketiga adalah pengaruh konflik Saudi-Iran dan Sunni-Syiah terhadap Pemerintah Pakistan. Judul ini akan menjabarkan tentang bagaimana konflik Saudi-Iran di konteks internasional dan konflik Sunni-Syiah di dalam negeri mempengaruhi Pemerintah Pakistan untuk menolak membantu serangan udara Arab Saudi di Yaman.

a. Kompleksitas Konflik Iran dan Saudi

Hubungan Saudi-Iran sebelum revolusi 1979

Hubungan Saudi-Iran dimulai setelah berdirinya dinasti al-Saud di tahun 1928. Kunjungan formal antar kepala negara tidak terjadi sebelum tahun 1980-an. Dorongan untuk meningkatnya dialog diplomatik di antara kedua negara tersebut disebabkan oleh jatuhnya Raja Faisal di Irak. Raja Faisal yang kalah dari kekuatan nasionalis

memunculkan kekhawatiran tentang kemungkinan adanya pemberontakan lain yang juga menentang dinasti monarki di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, Shah Muhammad Reza Pahlevi dan Raja Saudi Sa'ud, dan terutama Faysal setelah berhasil mengambil alih kekuasaan di tahun 1964, mulai sebuah diskusi rutin untuk mengkoordinasi kebijakan regional mereka, yang kemudian mempererat hubungan antar keluarga dan negara mereka.¹⁷⁷

Hubungan setelah Revolusi sampai perang Iran-Irak

Setelah jatuhnya Shah Iran di awal tahun 1979 hubungan Saudi-Iran menjadi jungkir balik. Kesuksesan revolusi tersebut merupakan musuh yang selama ini dilawan bersama oleh keluarga Sa'ud dan Shah. Selama lebih dari sepuluh tahun setelah revolusi 1979, hubungan Saudi-Iran semakin memburuk dan putus secara diplomatik di tahun 1988. Arab Saudi memandang Iran sebagai kekuatan pengacau di wilayah mereka karena mereka mencoba berkali-kali untuk menularkan revolusi mereka ke negara-negara teluk lainnya. Sebaliknya, Iran memandang Saudi sebagai negara yang tidak pantas untuk melindungi tempat suci Islam. Ideologi pemerintahan mereka waktu itu pun berbeda di mana ideologi Khomeinist Iran sangat keras anti-monarki, ada jabatan formal para ulama di politik dan meneriakkan suara rakyat. Semua karakteristik tersebut berlawanan langsung dengan kebijakan domestik dan struktur politik Saudi. Selain pertentangan mereka di bidang ideologi dan kebijakan,"hubungan Saudi-Iran semakin tegang setelah peristiwa perebutan Masjid Agung Mekkah di tahun 1979, meskipun tidak ada bukti

¹⁷⁷ Jahner, A. (2012, Spring). Saudi Arabia and Iran: The Struggle for Power and Influence in the Gulf. *International Affairs Review* : Volume XX, Number 3, 37-50. Dipetik Oktober 4, 2016, dari <http://www.iar-gwu.org/sites/default/files/articlepdfs/Saudi%20Arabia%20and%20Iran.pdf>

langsung yang menunjuk bahwa Iran terlibat dalam insiden tersebut. Dampak utama dari revolusi Iran ini terhadap hubungan Saudi-Iran adalah semakin bertambahnya ketidakpercayaan antar kedua negara yang mengakhiri hubungan kerja sama diplomatik mereka dan menciptakan persaingan pahit dalam hal pengaruh dan kekuatan di wilayah sekitar mereka.¹⁷⁸

Di perang Iran-Irak yang mengikuti setelah berdirinya Republik Islam Iran, Arab Saudi mendukung Irak. Aksi ini kemudian memperburuk hubungan Saudi-Iran. Keputusan Saudi untuk mendukung Irak berlandaskan ketakutan Saudi bahwa Iran dan propagandanya akan kerajaan itu sendiri, akan membahayakan rejim dan otoritas Saudi. Atas hal inilah kenapa Saudi membantu Irak secara politik dan ekonomi saat negara tersebut berkonflik dengan Iran. Bahkan Saudi meminjamkan empat puluh miliar dolar Amerika kepada Irak untuk memperkuat pasukan mereka. Dampak politik tambahan pada saat perang tersebut termasuk berdirinya Gulf Cooperation Council (GCC) di tahun 1981, yang anggotanya dijejali oleh enam negara teluk yaitu Arab Saudi, Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan diikuti agenda politik anti-Iran mereka. GCC menjelaskan dalam piagamnya bahwa tujuan inti mereka adalah “untuk menegakkan koordinasi, integrasi, dan interkoneksi antar negara anggota di semua bidang,” terutama demi tujuan ekonomi dan pertahanan bersama. Dengan menimbang pertahanan bersama, sekretariat jenderal GCC Abdullah Bishara di tahun 1982 mengumumkan bahwa “perjuangan supremasi Iran di Teluk adalah sebuah ancaman bagi stabilitas GCC.” Ancaman yang Bishara deskripsikan sangat mirip dengan ketakutan Arab Saudi tentang bahayanya Iran

¹⁷⁸ Ibid.

terhadap rejimnya di tambah sengketa wilayah yang belum terselesaikan yang masih dimiliki negara seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait dengan Iran.¹⁷⁹

Selagi perang Iran-Irak berlangsung, Arab Saudi menggunakan kebijakan ekonomi untuk menyulitkan Iran. Tidak seperti sanksi yang kebanyakan kekuatan Barat gunakan kepada Iran akhir-akhir ini, Saudi “membangjiri pasar internasional dengan minyak pada tahun 1985-86, mengikuti serangan Iran di pelabuhan Fao milik Irak. Kebijakan tersebut menyebabkan harga minyak jatuh. Strategi ini melukai ekonomi Iran karena jatuhnya harga minyak mengakibatkan turunnya pendapatan negara tersebut saat tahun-tahun di mana biaya pertahanan negara memuncak akibat tuntutan perang. Kemampuan Arab Saudi yang memiliki pengaruh besar terhadap harga minyak dunia akan terus menegangkan hubungan antara Arab Saudi dan Republik Islam Iran di tahun berikutnya.¹⁸⁰

Hubungan Saudi-Iran mencapai titik terendah setelah terjadinya insiden Mekah 1987. Peserta haji dari Iran melakukan protes dan demonstrasi saat melakukan ibadah haji. Aksi tersebut mengakibatkan pertikaian dengan pasukan keamanan Saudi. 275 jemaah haji Iran meninggal dan 303 lainnya cidera. Pasukan keamanan Arab Saudi juga menderita korban yang banyak. Korban di pihak Saudi ada juga yang meninggal dan cidera akibat insiden tersebut. Arab Saudi menyalahkan Iran atas konfrontasi tersebut. Saudi mengatakan bahwa Iran telah melanggar “makna spiritual” dari ibadah haji. Saudi sekaligus juga menegaskan kebijakan yang mana mereka tidak akan mengizinkan para jemaah haji “di eksploitasi oleh negara atau kelompok demi kepentingan politik.” Tragedi

¹⁷⁹ Ibid.

¹⁸⁰ Ibid.

tersebut, yang dideskripsikan oleh beberapa cendekiawan sebagai “insiden terburuk sejak Revolusi Islam” di kota suci Mekah, membuat Republik Islam Iran marah besar sambil menambah ketakutan Saudi akan aspirasi Iran dalam menumbangkan dan menggulingkan rejim al-Saud. Retorika Iran memperkuat ketakutan ini saat “Teheran mempertanyakan kredibilitas keluarga al-Saud sebagai pelindung tempat Islam yang paling suci, dan menyuarakan keruntuhan rejim Sudi.” Pada akhirnya, hubungan diplomatik putus di tahun 1988, dan Iran memboikot jemaah haji di tahun berikutnya.¹⁸¹

Setelah Perang Iran-Irak

Dengan berakhirnya perang Iran-Iraq di tahun 1989, putusnya hubungan diplomatik Saudi-Iran berlanjut. Bagaimanapun, dengan adanya invasi pasukan Irak di Kuwait pada 1990, hubungan mereka mulai sejuk. Perang teluk membuat Iran dan Arab Saudi mereka bersatu melawan musuh yang sama yaitu Irak. Berakhirnya perang tersebut mengendorkan ketegangan hubungan mereka, meskipun hubungan diplomatik belum dipulihkan sampai 19 Maret 1991.¹⁸²

Peristiwa pada dekade sebelumnya akan memberikan luka permanen pada hubungan Saudi-Iran. Bagaimanapun, seperti hubungan Saud-Iran miliki sebelum 1979, fokus terhadap kepentingan politik dan ekonomi bersama mengurangi rasa permusuhan di antara mereka meskipun terjadi ketegangan di tahun 1980-an. Agresi Irak merangkul mereka untuk berdampingan di mana Iran masih anti-Irak pasca perang Iran-Irak dan Arab Saudi jadi memandang Irak sebagai ancaman yang lebih besar dibanding Iran. Kedua negara ini juga mulai berdiskusi mengenai isu-isu ekonomi, terutama ketika Iran

¹⁸¹ Ibid.

¹⁸² Ibid.

mulai melihat “hubungan dengan Arab Saudi sebagai hal penting terutama di bidang hasil minyak, yang mana akan mendorong rekonstruksi negaranya. Tiga tahun perang dengan Irak menyisakan Iran banyak isu-isu sosial ekonomi domestik yang harus diselesaikan, termasuk inflasi tinggi dan pengangguran. Presiden yang baru saja dilantik Presiden Ayatollah Hashemi Rafsanjani berjanji untuk mengatasi isu tersebut sekaligus meletakkan “normalisasi hubungan dengan negara-negara sekitar Teluk Persia di puncak agenda kebijakan luar negeri mereka.” Membangun hubungan dengan Arab Saudi sangatlah instrumental dalam memperbaiki situasi ekonomi Iran pasca perang terutama karena Arab Saudi memiliki suplai minyak yang banyak (kira-kira seperempat suplai minyak dunia) dan kemampuan Arab untuk mempengaruhi harga minyak seperti yang dia lakukan di pertengahan tahun 1980-an. Oleh karena itu, Iran memandang hubungan dengan Arab Saudi sebagai sesuatu yang penting karena pengaruhnya di kawasan dan pengaruhnya di OPEC.¹⁸³

Secara bersamaan, konsiderasi ekonomi juga dipertimbangkan di sisi Arab Saudi. Ibadah haji, yang merupakan pilar kelima Islam dan merupakan salah satu kewajiban ibadah Muslim, merupakan sumber penerimaan penting bagi kerajaan Saudi. Industri pariwisata religius sebenarnya menempati “peringkat kedua dalam sumber pendapatan luar negeri kerajaan Saudi,” menghasilkan sekitar dua puluh miliar sampai empat puluh miliar dolar AS setahun. Sebagai akibatnya, setelah boikot haji, warga Iran menempati urutan kedua dalam urusan jemaah haji terbanyak, ditambah lagi memberikan tambahan

¹⁸³ Ibid.

bagi Arab Saudi dengan adanya umrah. Oleh karena itu, potensi manfaat moneter dari pulihnya hubungan diplomatik juga mendorong Arab Saudi untuk mendekati Iran.¹⁸⁴

Selagi tahun 90-an berlangsung anggota GCC, yang mana anggotanya dekat dengan Arab Saudi, mulai menganggap konsepsi mereka tentang “ancaman Iran” sebagai sesuatu yang mungkin terlalu berlebihan. Hubungan Saudi-Iran yang rapuh semakin terkonsolidasikan dengan pengakuan GCC di tahun 1997 terhadap “niat Pemerintah Iran untuk membuka halaman baru dalam hubungannya dengan negara anggota GCC.” Meskipun sengketa teritorial dengan negara anggota tertentu masih belum usai, keseluruhan sikap GCC terhadap Iran menjadi lebih netral dan tidak bersifat antagonis. Secara keseluruhan, tahun 90-an diwarnai oleh pendekatan di antara Arab Saudi dan Iran yang terjadi karena berubahnya tujuan ekonomi dan kebijakan luar negeri Iran dan berkurangnya ketakutan Arab Saudi terhadap rencana Iran. Peternakan mendadak dalam hubungan Saudi-Irak juga mendekatkan Iran dan Arab Saudi, memungkinkan mereka untuk melupakan perbedaan dan kesalahan di waktu lampau demi melawan upaya Irak untuk menimba kekuasaan. Meskipun progres yang terjadi di tahun 1990-an membuat hubungan mereka nampak membaik, pergantian peristiwa di kawasan akan mendorong hubungan Saudi dan Iran kepada batasnya lagi.¹⁸⁵

Setelah Saddam

Pada 11 September 2001, serangan teroris yang terjadi di Amerika Serikat mendorong Timur Tengah, dan terutama negara Afghanistan dan Irak, kepada sorotan dunia internasional. Sebagai hasil dari serangan tersebut, Amerika Serikat mengintervensi

¹⁸⁴ Ibid.

¹⁸⁵ Ibid.

kawasan tersebut dan menginvasi kedua negara di bawah bendera War on Terror. Secara spesifik setelah tergulingnya Saddam Hussein, politik kekuasaan di kawasan Teluk kembali bergeser, dan memberi dampak yang buruk terhadap hubungan Saudi-Iran. Aksi Amerika Serikat telah mempengaruhi keseimbangan kekuasaan di antara negara-negara Timur Tengah sementara itu juga memicu kecenderungan ekstremisme yang tidak hanya muncul dari pembagian belahan dunia Barat dan Timur tetapi bahkan juga di antara Islam Sunni dan Syiah.¹⁸⁶

Selagi fokus Irak bergeser ke dalam negeri, dengan ancaman revolusi dan kekacauan, negara yang melemah ini mundur dari papan politik. Setelah itu, daripada terus fokus membatasi kekuasaan Iraq pasca jatuhnya Saddam, Arab Saudi dan Iran sekali lagi mengalami ketegangan karena perbedaan kepentingan, meskipun mereka terus bergandengan dalam beberapa isu lain. Isu-isu ini termasuk kepentingan bersama dalam minyak dan Islam ditambah bertemunya kepentingan nasional di tiga titik yaitu kondisi domestik yang sama, konflik regional, dan kekecewaan yang sama terhadap Amerika Serikat. Meskipun demikian, kebersamaan kepentingan ini, saat hilangnya Irak sebagai pemain politik inti di Teluk, tidak mampu menjaga kesejukan hubungan mereka seperti di tahun 1990-an.¹⁸⁷

Intervensi Arab Saudi di Yaman

Pada saat Arab Saudi melakukan intervensi terhadap pemberontakan Houthi di Yaman, Saudi-Iran bertukar kritik dan tuduhan lagi. Pada tahun 2015 kemarin Arab Saudi serta koalisinya melakukan serangan udara di Yaman dan melaksanakan blokade perairan

¹⁸⁶ Ibid.

¹⁸⁷ Ibid.

pada tanggal 26 Maret. Intervensi ini diminta oleh Presiden Abd Rabbuh Mansur Hadi yang telah kehilangan kursi kepresidenannya. Pesawat tempur dari Mesir, Moroko, Yordania, Sudan, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, dan Bahrain diluncurkan dalam intervensi tersebut.

Perdana Menteri Iran, Mohammad Javad Zarif menilai intervensi tersebut sebagai tindakan yang berbahaya karena dapat mengganggu kestabilan kawasan.¹⁸⁸ Perdana Menteri menuntut mereka untuk langsung menghentikan operasi tersebut.¹⁸⁹ Iran mendeskripsikan dan memperingati bahwa Riyadh telah mengambil tindakan berbahaya.¹⁹⁰ Iran menjelaskan bahwa hadirnya koalisi Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi melawan kelompok Syiah di Yaman akan mempersulit upaya perdamaian dari konflik tersebut. Parahnya konflik ini akan memperparah permusuhan sektarian di Timur tengah.¹⁹¹ Ali Khamenei, kepala negara Iran, menyebut pengeboman yang dilakukan Saudi sebagai aksi genosida. Khamenei kemudian mengatakan bahwa Arab Saudi “tidak akan menang dalam agresinya.”¹⁹²

¹⁸⁸ Eqbali, A., & Fitch, A. (2015, Maret 26). Iran Condemns Saudi Arabia's Military Intervention in Yemen. Dipetik Oktober 4, 2016, dari The Wall Street Journal: <http://www.wsj.com/articles/iran-condemns-saudi-arabias-military-intervention-in-yemen-1427366776>

¹⁸⁹ Abdallah, K., & Aboudi, S. (2015, Maret 26). Yemeni leader Hadi leaves country as Saudi Arabia keeps up air strikes. Dipetik Oktober 4, 2016, dari Reuters: <http://mobile.reuters.com/article/idUSKBN0ML0YC20150326?irpc=932>

¹⁹⁰ Fox News. (2015, Maret 26). Fox News. Dipetik Oktober 4, 2016, dari Saudi-led Forces strike rebel bases in Yemen as Iran warns of 'dangerous step': <http://www.foxnews.com/politics/2015/03/26/saudi-led-forces-strike-rebel-bases-in-yemen-as-iran-warns-dangerous-step/>

¹⁹¹ Abdallah, K., & Aboudi, S. Op. Cit.

¹⁹² BBC News. (2015, April 9). Yemen crisis: Iran's Khamenei condemns Saudi 'genocide'. Dipetik Oktober 4, 2016, dari BBC News: <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32239009>

Di sisi koalisi Saudi sendiri, mereka menuduh Iran mendukung Houti dengan jalan finansial serta militer.¹⁹³ Pada 9 April sekretariat negara AS John Kerry mengatakan bahwa ada suplai yang datang dari Iran dengan pesawat yang hilir mudik setiap minggunya. Kerry juga memperingatkan Iran untuk berhenti memberikan dukungannya kepada Houti.¹⁹⁴ Namun Iran menolak tuduhan ini.¹⁹⁵

Pasukan Anti-Houti pada suatu waktu sedang melindungi Aden. Mereka mengklaim bahwa mereka telah menangkap dua pasukan Quds Force Iran pada 11 April, yang konon melayani sebagai penasihat militer kutuk militan Houti di kota tersebut.¹⁹⁶ Bagaimanapun tuduhan ini tidak terulang. Iran juga menolak tuduhan tersebut.¹⁹⁷

Menurut Michael Horton, seorang ahli di bidang hubungan luar negeri Yaman, mengatakan bahwa Houti sebagai proxy Iran itu tidak masuk akal. Horton berkata “Houti tidak memerlukan senjata Iran. Mereka sendiri punya banyak senjata. Mereka juga tidak perlu pelatihan militer. Mereka sudah bergelut dengan al-Qaeda setidaknya sejak tahun 2012, dan Houti lebih kuat dari al-Qaeda.”¹⁹⁸

¹⁹³ Bayoumy, Y., & Ghobari, M. (2014, Desember 15). Iranian support seen crucial for Yemen's Houthis. Dipetik Oktober 4, 2016, dari Reuters: <http://www.reuters.com/article/2014/12/15/us-yemen-houthis-iran-insight-idUSKBN0JT17A20141215>

¹⁹⁴ BBC News. (2015, April 9). Yemen crisis: Kerry warns Iran over Houthi rebel 'support'. Dipetik Oktober 4, 2016, dari BBC News: <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32229316>

¹⁹⁵ Wilkin, S., Georgy, M., & Pomeroy, R. (2015, April 12). Iran denies military advisors captured in Yemen. Dipetik Oktober 4, 2016, dari Reuters: <http://www.reuters.com/article/2015/04/12/yemen-security-iran-idUSL5N0X90L120150412>

¹⁹⁶ Al-Sayaghi, M. (2015, November 4). Yemeni Militiamen Claim Capture of Iranian Military Officers. Dipetik Oktober 4, 2016, dari News Week: <http://www.newsweek.com/yemen-militia-claims-iranians-captured-321734>

¹⁹⁷ Wilkin, S., Georgy, M., & Pomeroy, R. Op. Cit

¹⁹⁸ Perry, M. (2015, April 17). US generals: Saudi intervention in Yemen 'a bad idea'. Dipetik Oktober 4, 2016, dari Al-Jazeera America: <http://america.aljazeera.com/articles/2015/4/17/us-generals-think-saudi-strikes-in-yemen-a-bad-idea.html>

Menurut AFP (Agence France-Presse), sebuah laporan rahasia diserahkan ke komite sangsi Iran di Dewan Keamanan PBB pada April 2015. Laporan tersebut mengklaim bahwa Iran telah mengirim senjata-senjata kepada pemberontak Houthi sejak sekitar tahun 2009 dan 2013.¹⁹⁹

Menurut para pejabat Amerika, Iran mencoba menghalangi pemberontak Houthi untuk tidak merebut ibu kota Yaman di tahun 2014. Hal ini menambah keraguan klaim tentang perang proxy Iran di kasus Houthi. Seorang narasumber dari Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat mengatakan bahwa hal ini masih menjadi penilaian dewan bahwa Iran tidak memerintah dan mengendalikan Houthi di Yaman.²⁰⁰

Pada 6 Mei, Kepala negara Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan “Orang Amerika tanpa rasa malu mendukung pembunuhan populasi Yaman, tapi mereka malah menuduh Iran ikut campur di negara tersebut dengan alasan mengirim senjata ketika padahal Iran hanya mencoba memberikan bantuan makanan dan obat-obatan.”²⁰¹

Pada 26 September 2015, Arab Saudi mengumumkan bahwa pasukan koalisi Arab Saudi telah mencegat sebuah kapal nelayan Iran dengan muatan senjata, termasuk Roket dan peluru anti-tank, di Laut Arab 150 mil ke arah tenggara dari Pelabuhan Salalah negara Oman.²⁰²

¹⁹⁹ Landry, C. (2015, Mei 1). Iran arming Yemen's Houthi rebels since 2009: UN report. Dipetik Oktober 4, 2016, dari Yahoo! News: <http://news.yahoo.com/iran-arming-yemens-houthi-rebels-since-2009-un-202936346.html>

²⁰⁰ Watkins, A., Grim, R., & Ahmed, A. S. (2015, April 20). Iran Warned Houthis Against Yemen Takeover. Dipetik Oktober 4, 2016, dari The Huffington Post: http://www.huffingtonpost.com/2015/04/20/iran-houthis-yemen_n_7101456.html

²⁰¹ AFP. (2015, Mei 6). Iran leader says US backing 'immense crimes' in Yemen. Dipetik Oktober 6, 2016, dari Yahoo! News: <https://www.yahoo.com/news/iran-leader-says-us-backing-immense-crimes-yemen-141117588.html?ref=gs>

²⁰² al-Mujahed, A., & DeYoung, K. (2015, Maret 26). Saudi Arabia launches air attacks in Yemen. Dipetik Oktober 4, 2016, dari The Washington Post:

b. Kompleksitas Konflik Sektarian di Domestik Pakistan

Latar Belakang Konflik Sektarian

Kekerasan sektarian banyak terjadi di Pakistan pada tahun 1980-an dan awal 1990-an. Mantan diktator militer Jendral Ziaul Haq's (memerintah di tahun 1977-1988), kebijakan dan legislasinya yang ditujukan untuk islamisasi Pakistan di formulasikan berdasarkan versi ortodoks dari Islam Sunni. Contohnya, pada tahun 1980 Zia mewajibkan zakat dan ushur yang kontradiksi dengan praktek Syiah. Hal tersebut membuat masyarakat Syiah kecewa. 100.000 penduduk Syiah berdemo di Islamabad, menuntut Jendral Zia untuk mencabut peraturan tersebut karena sangat menyinggung mereka. Namun demonstrasi tersebut juga memancing kemarahan Sunni garis keras. Khawatir dengan kekuatan Syiah, kelompok Sunni menggunakan penolakan Syiah terhadap kewajiban bayar zakat sebagai kesempatan untuk menyebut Syiah sebagai kelompok yang bidah dan murtad, sebuah keyakinan yang masih ada di dalam kelompok ekstremis Deobandi Sunni.²⁰³

Ketegangan sektarian yang baru saja muncul di domestik Pakistan ini diperparah oleh tren geopolitik. Mengikuti Revolusi Iran 1979, Muslim Syiah, termasuk yang ada di Pakistan, ikut terbawa semangat revolusi. Pada waktu yang sama, organisasi dan madrasah Deobandi Sunni di Pakistan mulai menerima senjata dan dana dari Arab Saudi dan Amerika Serikat demi memberikan bantuan dan pelatihan untuk prajurit Sunni Afghanistan dalam konteks jihad anti-soviet di Afghanistan. Setelah Soviet mundur dari

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/report-yemens-embattled-president-flees-stronghold-as-rebels-advance/2015/03/25/e0913ae2-d2d5-11e4-a62f-ee745911a4ff_story.html

²⁰³ Yusuf, H. (2012, Juli). Sectarian Violence: Pakistan's greatest security threat? NOREF Report, 1-9. Dipetik Oktober 4, 2016, dari <https://www.ciaonet.org/attachments/21361/uploads>

Afghanistan di tahun 1989, para prajurit tersebut membentuk kelompok militan anti-Syiah yang berbasis di distrik selatan Provinsi Punjab Pakistan. Wilayah itu miskin, tertinggal, termarginalisasi secara politik, dan terdapat kontras di antara Si Syiah yang kaya dan Si Sunni yang miskin menjadikan wilayah tersebut sempurna untuk menjadi lahan rekrutmen kelompok ekstremis sektarian.²⁰⁴

Karena terjadi perkembangan tersebut, Pakistan menyaksikan bentrokan-bentrokan Sunni-Syiah di sekitar tahun 1980-an dan awal 2000-an. Sekitar 4000 orang diperkirakan meninggal dalam memperjuangkan sekte masing-masing. Negara tersebut menjadi arena perang bagi perang proxy Saudi-Iran sebagaimana negara tersebut memberikan dukungan logistik dan finansial untuk kelompok yang satu aliran dengan mereka. Melalui kebijakan di akhir tahun 1990-an, terutama di wilayah pusat urban di Karachi dan Lahore, menyebabkan banyaknya organisasi sektarian yang bubar. Keputusan Presiden Pervez Musharraf di tahun 2001-2002 yang melarang adanya kelompok militan Sunni-Syiah juga membantu meredam kekerasan sektarian di Pakistan.²⁰⁵

Kebangkitan Kekerasan Sektarian

Sejak tahun 2007 ada kebangkitan kekerasan sektarian di Pakistan. Menurut South Asia Terrorism Portal, sebuah database Online, mencatat ada 631 insiden sektarian pada tahun 2007 sampai 2011 di Pakistan. Hal tersebut telah memakan korban 1.649 orang. Pada tahun 2010, 509 orang terbunuh dan 1.170 cidera dalam 57 insiden kekerasan sektarian. Pada tahun 2011 insiden kekerasan sektarian sempat menurun (203 meninggal

²⁰⁴ Ibid.

²⁰⁵ Ibid.

dan 297 cedera dalam 30 insiden), namun pada lima bulan awal tahun 2012 memuncak lagi: di antara Januari sampai Mei 177 orang meninggal dalam 51 insiden. Sesuai dengan tren sejarah, mayoritas kekerasan tersebut muncul di antara Sunni dan Syiah (Syiah menderita korban paling banyak, sekitar 70% dari seluruh kematian akibat konflik sektarian dari tahun 1985 sampai 2005). Selain itu, kekerasan intra-sektarian di antara Sunni Deobandi dan Barelvi juga memuncak. Ratusan penganut aliran Barelvi (sufi) dibunuh dengan lebih dari 70 bom bunuh diri di makam para sufi pada tahun 2005 sampai 2010. Terlebih lagi, dua tokoh pemimpin Barelvi diincar oleh militan Deobandi di tahun 2009: bulan Juni, Mufti Sarfraz Ahmed Naeemi, seorang ulama senior Barelvi yang berkali-kali berbicara melawan orang Taliban Pakistan, dibunuh dengan bom bunuh diri di Lahore; pada bulan September, Hamid Saeed Kazmi, yang menjadi menteri agama Pakistan, ditembak mati oleh dua orang. Di Karachi, kota terbesar dan pusat komersial Pakistan, bentrokan di antara organisasi ekstrem Sunni sudah sering, baku tembak di wilayah Godhra di kota tersebut pada September 2011 menyisakan delapan mayat.²⁰⁶

Kebangkitan kekerasan sektarian – terutama bentrokan Sunni-Syiah – dapat di lacak kembali ke pertengahan tahun 2000-an yang merupakan dampak paling berbahaya bagi Pakistan dari War on Terrornya Amerika di Afghanistan. Pada tahun 2006 pasukan Taliban mencari tempat berlindung di Kurram, sebuah pedesaan di barat laut Pakistan. Di sana mereka menyerang suku Syiah yang berbasis Parachinar. Garis keras Deobandi Taliban secara ideologis anti-Syiah, namun sektarianisme mereka juga memiliki elemen pragmatis: mereka perlu akses rute ke Afghanistan melalui Kurram yang dikuasai oleh Syiah lokal. Para Taliban tersebut tetap menjalankan serangan anti-Syiahnya di Federally

²⁰⁶ Ibid.

Administered Tribal Area (FATA). Hal tersebut menyebabkan rekonsolidasi kelompok ekstremis Syiah barat laut Pakistan karena berusaha mempertahankan wilayah mereka. Kebangkitan kelompok Syiah tersebut kemudian meremobilisasi organisasi ekstremis Sunni yang, dengan dukungan Taliban, mendapatkan mandat sektarian mereka dari luar negeri.²⁰⁷

Aktor Utama

Tidak seperti kekerasan antar agama, di mana anggota jemaah biasanya memobilisasi menentang penganut agama minoritas yang dapat mendorong ekstremisme ulama atau kelompok, kekerasan sektarian sebagian besar disebabkan oleh anggota organisasi militan ekstremis. Berikut adalah aktor-aktor utama yang sedang terlibat dalam kekerasan sektarian di Pakistan:²⁰⁸

- Ahle Sunnat Wal Jamaat (ASWJ): ASWJ merupakan nama baru dari Sipah-e-Sahaba Pakistan atau SSP (kelompok ini sebelumnya sudah dilarang berdiri oleh pemerintah). SSP adalah sebuah kelompok organisasi militan ekstremis Sunni (Deobandi) dan telah melakukan serangan terhadap Syiah, yang mereka pandang sebagai orang kafir, sejak 1985. Akhir-akhir ini SSP juga bentrok dengan kelompok Barelvi. Kelompok tersebut memiliki ikatan yang kuat dengan Taliban Pakistan dan mengirimkan rekrut baru mereka ke pedesaan Pakistan untuk latihan. SSP juga beroperasi sebagai partai politik dan anggotanya juga telah diangkat menjadi anggota parlemen atau diberikan hak untuk mendukung politisi dari partai politik mainstream, terutama di provinsi Punjab. Sebagai tanggapan dari

²⁰⁷ Ibid.

²⁰⁸ Ibid.

kekerasan sektarian yang semakin meningkat, Pemerintah Pakistan membubarkan ASWJ pada Maret 2012, meskipun kelompok tersebut masih beroperasi.

- Lashkar-e-Jhangvi (LeJ): LeJ, yang merupakan cabang dari SSP, adalah sebuah kelompok ekstremis Sunni yang menganggap Muslim Syiah kafir dan aktif dalam peperangan sektarian di Karachi, Balochistan dan Punjab Selatan. Di tahun 2012 LeJ memfokuskan serangan sektarian mereka terhadap Syiah Hazaras dari Balochistan. Akhir-akhir ini mereka mulai berbeda dari fokus awal mereka (anti-Syiah) dan beraliansi dengan kelompok militan lain untuk melawan negara Pakistan dan Barat di Pakistan dan Afghanistan. Kelompok ini memiliki hubungan yang kuat dengan Taliban Pakistan dan al-Qaeda, dan menyediakan mereka senjata, uang dan rekrutmen baru. Laporan intelijen mengaitkan LeJ ke kasus pembunuhan mantan Perdana Menteri Benazir Bhutto di tahun 2007. Kelompok ini juga dituding atas percobaan pembunuhan Perdana Menteri Nawaz Sharif dan kakaknya, Shahbaz Sharif, di tahun 1999.
- Tehrik-e-Taliban Pakistan (Taliban Pakistan): Taliban Pakistan adalah sebuah kelompok militan berbasis koalisi FATA yang bertujuan untuk meruntuhkan negara Pakistan dan mendirikan Hukum Islam. Kelompok tersebut telah melakukan serangan bunuh diri terhadap petugas keamanan negara dan masyarakat sejak 2007. Di tahun terakhir mereka memberikan dana, dukungan logistik, pelatihan dan suaka bagi militan teriakt dalam organisasi sektarian Deobandi seperti LeJ dan ASWJ, dan kelompok ini bisa dianggap telah membangkitkan kekerasan sektarian di Pakistan.

- Sipah-e-Mohammadi Pakistan (SMP): SMP di dirikan pada tahun 1993 dengan tujuan untuk melindungi komunitas Syiah Pakistan dari kelompok militan ekstremis Sunni. Kelompok tersebut bangkit lagi pada tahun 2008-2009 dan sangat aktif di pusat urban Karachi dan Lahore. Selain melakukan pembunuhan balas dendam terhadap anggota LeJ dan ASWJ, SMP juga dituduh telah membunuh doktor-doktor terkemuka Sunni. Menurut laporan, kelompok tersebut memperoleh dukungan dan dana dari Iran. Tahun 2011, empat militan SMP ditahan karena terkait kasus serangan granat ke konsulat Arab Saudi di Karachi pada Mei 2011.
- Tehrik-e-Jafria Pakistan (TJP): TJP merupakan cabang dari Tehrik-e-Nifaz-e-Fiqah Jafria, sebuah partai politik Syiah yang didirikan pada tahun 1979 dengan tujuan untuk melindungi komunitas Syiah Pakistan dari Jendral Ziaul Haq yang membawa paham hukum Islam Sunni dan luasnya diskriminasi di kalangan tentara dan departemen pemerintah. TJP telah di larang dua kali, tapi tetap beroperasi dengan nama lain. Anggotanya diprioritaskan untuk mengorganisasi pejuang Syiah dalam melawan ekstremisme Sunni, selain itu mereka juga terlibat dalam insiden kekerasan sektarian.
- Sunni Tehrik (ST): ST memandang diri mereka sebagai organisasi politik yang bergerak untuk mempertahankan Sunni Barelvi dari serangan sektarian dari kelompok Doebandi. Kelompok ini merupakan kelompok yang terorganisir paling baik di antara 4.000 organisasi Sunni Barelvi di Karachi, yang kebanyakan mereka beroperasi hanya dalam satu lingkungan saja. Militan ST membalas

serangan yang terutamanya dilakukan oleh ASWJ. Mereka juga berebut wilayah dengan sekte lain demi meraih kontrol atas masjid-masjid.

- Jundullah: kelompok ini merupakan kelompok militan anti-Syiah yang memiliki ikatan dengan Taliban Pakistan, LeJ dan ASWJ. Militan Jundullah telah di tahan karena koneksi mereka dengan kasus ledakan bom pada prosesi ibadah Syiah di Karachi pada Desember 2009 yang membunuh 40 orang. Karena ikatannya dengan Taliban Pakistan, Jundullah juga menyerang petugas keamanan negara.

c. Pengaruh Konflik Saudi-Iran dan Sunni-Syiah Terhadap Pemerintah Pakistan.

Dari dua judul di atas, penulis mengemukakan ada dua hal yang menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Pakistan. Dua hal tersebut yakni adanya konflik Saudi-Iran dan konflik Sunni-Syiah di domestik Pakistan itu sendiri. Kemudian tahap selanjutnya adalah menganalisa bagaimana konflik Saudi-Iran dan Konflik Sunni-Syiah tersebut mempengaruhi pembuatan kebijakan Pemerintah Pakistan.

Penyebab mengapa konflik Saudi-Iran dapat mempengaruhi Pemerintah Pakistan adalah karena adanya Proyek Saluran Pipa Gas Iran-Pakistan yang akan menerima dampak dari keputusan Pakistan untuk membantu Arab Saudi. Proyek saluran pipa gas ini adalah proyek yang sudah menjadi diskusi di antara Iran dan Pakistan sejak tahun 1994. Proyek tersebut kemudian baru dimulai pada 16 Maret 2010.²⁰⁹

²⁰⁹ Munir, M., Ahsan, M., & Zulfqar, S. (2013). Iran-Pakistan Gas Pipeline: Cost-Benefit Analysis. *Journal of Political Studies*, 20(2), 161-178. Dipetik dari http://pu.edu.pk/images/journal/pols/pdf-files/Iran%20-%20Pakistan%20gas%20%20-%20Munir_VOLUME20_2_13.pdf

Proyek saluran pipa gas tersebut sangatlah penting bagi Pakistan untuk mengatasi krisis energi yang mereka alami. Krisis energi mereka ini sangat jelas dibuktikan oleh seringnya terjadi pemadaman lampu bergilir selama berjam-jam sejak tahun 2007. Hal ini terjadi karena Pakistan kekurangan tenaga listrik sebesar 5.000-7.000 MW. Proyek saluran pipa gas Iran-Pakistan tersebut akan menyediakan 21.5 juta meter kubik gas alam sehari untuk Pakistan. Dengan adanya tambahan gas alam ini, diperkirakan akan menambah daya listrik sebesar 5.000-6.000 MW. Selain membantu mengatasi krisis energi, proyek tersebut juga akan membuka lapangan kerjasama Iran-Pakistan dalam pembuatan kilang minyak di pelabuhan Gwadar (Balochistan, Pakistan) yang memiliki kapasitas penyulingan minyak sebesar 400.000 barel per hari. Selain itu saluran pipa gas Iran-Pakistan tersebut memiliki kemungkinan untuk menjalar sampai ke India, yang sebelumnya pernah bergabung dalam proyek ini namun keluar atas desakan Amerika Serikat. Dengan demikian, kedepannya tidak hanya Pakistan yang akan meraih untung, India yang juga sedang mengalami krisis energi akan mendapatkan untungnya. Kemudian perdamaian di antara Pakistan dan India juga akan dengan mudah terwujud.²¹⁰

Selanjutnya, untuk pengaruh konflik Sunni-Syiah terhadap Pemerintah Pakistan, alasannya adalah karena konflik di Yaman memiliki kemungkinan untuk meluas ke masalah sektarian. Kekhawatiran akan meluasnya konflik Yaman ke bidang konflik sektarian itu dinyatakan sendiri oleh Parlemen Pakistan pada 10 April 2015. Pada paragraf pertama dari resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis-e-Shoora (Parlemen Pakistan), menyatakan pendapat mereka yang berbunyi “Konflik di Yaman pada dasarnya bukan

²¹⁰ Ibid

masalah sektarian tetapi memiliki potensi untuk berubah menjadi konflik sektarian, yang akan memiliki dampak yang kritis terhadap kawasan, termasuk Pakistan”.²¹¹

Pemerintah Pakistan pada tahun 2013 pernah merilis dokumen “Strategic Vision Pakistan’s Foreign Policy”. Dokumen tersebut merupakan pidato tertulis dari Sartaj Aziz yang merupakan Penasehat Perdana Menteri Pakistan pada bidang Hubungan Luar negeri. Dokumen itu menekankan bahwa negara “Pakistan sedang mengalami perang dari dalam negeri. Melihat kondisi negara yang demikian, Pakistan memutuskan untuk memusnahkan budaya ekstrimisme, intoleransi dan kekerasan melalui kebijakan non-intervensi dalam urusan negara lain”.²¹² Jika Pakistan melanggar janji tersebut dan ternyata konflik di Yaman berkembang menjadi konflik sektarian, maka konflik dalam negeri Pakistan akan semakin parah mengingat pada tahun 2007-2011 saja tercatat ada 631 insiden sektarian yang dipicu oleh konflik Sunni-Syiah.²¹³ Tentu berdasarkan hal ini Pakistan tidak akan mau terlibat dalam konflik Yaman jika di dalam negeri sendiri sudah sering terjadi konflik sektarian.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut lah yang kemudian membuat Parlemen Pakistan pada 10 April 2015 memutuskan untuk netral dalam konflik Yaman dan menolak untuk membantu serangan udara Arab Saudi di Yaman.²¹⁴ Sebagai tambahan, keputusan tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

“Setelah menimbang situasi Yaman dan implikasinya terhadap kedamaian dan keamanan regional serta internasional; dan melihat bahwa konflik di Yaman yang

²¹¹ Dawn (2015, 13 April). Full text of Pakistan resolution on Yemen. Dipetik 3 Januari 2017, dari Dawn: <http://www.dawn.com/news/1175696>

²¹² Aziz, S., Op. Cit. Hal. 1

²¹³ Yusuf, H., Op. Cit.

²¹⁴ Ritzinger, L. (2015, 27 April). Why Pakistan Is Staying Out of Yemen. Dipetik 3 Januari 2017, dari The National Interest: <http://nationalinterest.org/feature/why-pakistan-staying-out-yemen-12730>

pada dasarnya bukan konflik sektarian namun memiliki potensi untuk berubah menjadi konflik sektarian, yang akan berdampak kritis di wilayah sekitarnya, termasuk Pakistan,

Majlis-eShoora (Parliament) of Pakistan:

1. Menghargai keputusan Pemerintah untuk mengadakan Sidang Gabungan Parlemen untuk mempertimbangkan tanggapan Pakistan terhadap krisis di Yaman;
2. Menyatakan perhatian yang serius terhadap memburuknya situasi keamanan dan humanitarian di Yaman serta implikasinya terhadap keamanan dan stabilitas wilayah dan mendukung semua inisiatif humanitarian yang ditujukan untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam konflik tersebut;
3. Menyuarakan kepada pihak-pihak yang berkonflik di Yaman untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai melalui dialog;
4. Menghargai rencana yang dibuat oleh Pemerintah untuk mengevakuasi Warga Negara Pakistan dan Warga Negara Asing dari Yaman dan menyampaikan terimakasih Pemerintah kepada Republik Rakyat China atas kontribusinya dalam urusan ini;
5. Memahami bahwa krisis di Yaman dapat menjatuhkan kawasan ke dalam kekacauan.
6. Mendukung upaya regional dan internasional untuk mengembalikan kedamaian dan stabilitas di Yaman.

7. Menggarisbawahi tentang perlunya Pemerintah Pakistan untuk terus mencari resolusi damai dari krisis tersebut, sekaligus mempromosikan persatuan Umat Muslim, dalam kerjasama antar Pemimpin Negara Muslim;
8. Menginginkan bahwa Pakistan harus menjaga netralitas di konflik Yaman agar dapat menjalankan peran diplomasi proaktif untuk mengakhiri krisis tersebut.
9. Mengajak Umat Muslim dan komunitas internasional untuk mengintensifkan upaya mereka untuk mempromosikan perdamaian di Yaman;
10. Menyatakan dukungan yang tegas untuk Kerajaan Arab Saudi dan menegaskan jika terjadi kasus pelanggaran integritas teritorial di Arab Saudi atau ancaman terhadap Haramain Sharifain (Makkah dan Madinah), Pakistan akan membantu Arab Saudi beserta penduduknya;
11. Menyatakan perhatian yang mendalam atas meningkatnya ancaman yang diberikan oleh berbagai kelompok teroris dan aktor non-negara terhadap keamanan dan stabilitas kawasan dan menganjurkan kepada Pemerintah Pakistan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasamanya dengan GCC dan negara-negara regional lain dalam melawan ekstremisme dan terorisme; dan
12. Menginginkan Pemerintah Pakistan untuk memulai langkah-langkah untuk membujuk Dewan Keamanan PBB dan OIC untuk langsung mengadakan gencatan senjata di Yaman.

Sd/- Mr. Mohammad Ishaq Dar, Minister for Finance, Revenue, Economic Affairs, Statistics and Privatization Syed Khursheed Ahmed Shah, Leader of the

Opposition in National Assembly Mr. Aitazaz Ahsan, Leader of the Opposition in the Senate Mr. Hasil Khan Bizenjo, Senator Mr. Mushahid Hussain Syed, Senator Al-Haj Shah Jee Gul Afridi, MNA Makhdoom Shah Mahmood Hussain Qureshi. MNA Mr. Mahmood Khan Achakzai, MNA Mr. Iqbal Muhammad Ali Khan, MNA Sahibzada Tariq Ullah, MNA Mr. Aftab Ahmed Khan Sherpao, MNA Mr. Ghous Bux Khan Mahar, MNA”²¹⁵

²¹⁵ Dawn (2015, 13 April). Full text of Pakistan resolution on Yemen. Dipetik 3 Januari 2017, dari Dawn: <http://www.dawn.com/news/1175696>